

**Muhammadiyah Dan Pendidikan Politik
(Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Aek Kanopan
Barat Kabupaten Labuhan Batu Utara)**

Anong Syahputra¹, Zulhilmi², Muntasir³, Bimby Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh-
Indonesia

E-mail Korespondensi : zulhilmi@unimal.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat dalam bentuk pengajian. Kegiatan tersebut mengundang Kader yang menjadi calon kepala Daerah pada Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kajian awal menganalisis tentang peran Muhammadiyah dalam memberikan pendidikan politik pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kajian selanjutnya menganalisis tentang hambatan Muhammadiyah dalam melakukan peran Pendidikan Politik pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kerangka teoritis meliputi Pendidikan Politik, Pilkada, dan Partisipasi Politik. Kajian ini menggunakan metode Kualitatif, dengan berfikir secara ilmiah kemudian mengumpulkan berbagai fakta dilapangan serta menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat mengundang kedua kader yang mencalon pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Utara salah satunya membawa materi pendidikan politik untuk memberi ruang kepada kader tersebut, diawali dengan keputusan yang diambil Pimpinan Daerah Muhamamdiyah untuk melakukan rekomendasi terhadap calon nomor urut 4, yang ditakutkan akan merusak dukungan dalam Muhammadiyah yang membuat pecah dan timbulnya gesekan dikalangan internal terutama pengurus. Peran juga dilaksanakan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Labuhan Batu Utara dengan mengadakan pekumpulan gabungan kelompok. Hal ini dilakukan pada proses mencari dukungan politik

Kata Kunci :

Pendidikan Politik; Muhammadiyah; Pilkada

A. PENDAHULUAN

Muhammadiyah merupakan salah satu Organisasi Masyarakat Islam terbesar di Indonesia, lahir pada 18 November tahun 1912 dengan pendirinya Muhammad Darwis atau di kenal KH. Ahmad Dahlan. Perjuangan yang dilalui oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan untuk merebut kekuasaan menciptakan kemerdekaan bagi rakyat, Muhammadiyah juga ikut berperan dalam kemerdekaan tersebut bahkan jika melihat kebelakang dalam sejarah peran tersebut berada di posisi vital.

Muhammadiyah bukanlah organisasi politik melainkan organisasi nonpolitik. Sebagai organisasi nonpolitik, Muhammadiyah memiliki peran politik bisa disebut tidak secara langsung dan terbuka, tetapi terkadang dengan keadaan situasional dilakukannya peran secara langsung dan terbuka. Hal inilah yang membuat masyarakat salah beranggapan mengartikan sebagai organisasi politik. Calon kepala daerah yang mengingatkan bahwa pada tahun 2020 akan berlangsung pesta demokrasi di Labuhan Batu Utara. Maka langkah yang akan diambil Muhammadiyah untuk menghadapi pemilihan kepala daerah ini harus rasional. Tentunya sikap tersebut menjadi peran yang membimbing dan mengayomi warganya agar tidak terpengaruh politik praktis dan terjadinya perdebatan ditubuh organisasi Muhammadiyah.

Keberadaan Muhammadiyah di kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan sebuah organisasi masyarakat Islam yang terpancang dari kalangan masyarakat di daerah tersebut secara terkhusus di Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu melalui perkembangan amal usaha yang mereka lakoni, tidak hanya itu perkumpulan pengajian dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. yang rutin mereka lakukan melalui diberbagai tingkat ranting menjadikan kegiatan tersebut sebagai ladang diskusi serta penambahan ilmu bagi mereka.

Labuhan Batu Utara telah meresmikan lima pasangan calon dari hasil pengambilan nomor dalam rapat pleno terbuka yang telah dilakukan. dan Pada tanggal 09 Desember 2020 akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah. Dan Bapak Aripay Tambunan merupakan wakil dari pasangan calon nomor urut 3. Kegiatan pengajian itu mengandung tuntutan atau memang pemahaman politik warga Muhammadiyah ranting barat masih cukup kurang. Pimpinan ranting Muhammadiyah di Aek Kanopan barat menghadirkan pemateri dari sosok kader yang telah mencalonkan diri sebagai wakil calon dalam pemilihan kepala daerah. Serta hal tersebut apakah tidak menimbulkan konsekuensi yang bersifat kampanye di dalam kegiatan Muhammadiyah.

Padahal warga muhammadiyah ranting di Aek Kanopan barat yang selalu mengikuti pengajian mempunyai patisipasi dukungan yang berbeda kepada pasangan calon lain, pastinya mereka menunut agar mendatangkan para calon yang lain. Peran muhammadiyah dalam melaksanakan pendidikan politik hanya sebatas pimpinan ranting. Sikap yang diambil oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah serta Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Labuhan Batu Uatara dalam menghadapi pemilihan kepala daerah sangat stagnan.

Kajian penelitian mengarah kepada peran muhammadiyah dalam menyikapi gejala menghadapi pilkada yang akan datang, sudah pasti muhammadiyah tidak ingin terjadi kerusakan – kerusakan ditubuh organisasi dengan membimbing dan mengarahkan warganya untuk tidak buta dan menghindarkan politik praktis. Secara Organisasi Muhammadiyah berpolitik secara netral memberi kebebasan partisipasi politik warganya untuk memberikan pilihan kepada salah satu calon. Maka dari itu sikap peran muhammadiyah kepada warganya menuju pemilihan kepala daerah labuhan batu utara.

Pendidikan politik adalah salah satu proses yang memberikan pemahaman politik, keberlangsungan sistem negara adalah sebagai proses politik, sudah sewajarnya diterapkan kepada masyarakat dan muda-mudi untuk salah satu kesiapan menghadapi pesta demokrasi. Maka melakukan pendidikan politik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bermaksud untuk membawa nilai teologis, Aqidah, membawa kebenaran bukan keburukan. (Kartini, 2012).

Peran organisasi adalah sebuah kajian yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam Masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. (Sarwono, 2015)

Peran Muhammadiyah mengambil sikap netral terhadap para calon yang akan maju. Bukan berarti Muhammadiyah tidak peduli terhadap pesta demokrasi lokal yang terselenggara, tetapi Muhammadiyah mencoba membangunnya melalui kerja-kerja kultural dengan cara pendidikan dan penyadaran politik terhadap anggotanya. Keputusan rapat pimpinan wilayah ini bukan hanya sebatas mengambil posisi netral saja dalam pemilihan gubernur mendatang, tetapi juga mengeluarkan instruksi kepada anggotanya untuk

memilih calon gubernur yang beragama Islam dan wakil gubernur yang beragama Islam juga.

Pendidikan Politik merupakan keharusan bagi setiap elemen bangsa baik yang tergabung dalam partai politik, ormas, LSM maupun masyarakat. Pentingnya pendidikan politik adalah untuk memberi keleluasaan dan kebebasan bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak-hak politiknya dan memenuhi kewajibannya (Syarbaini, 2010). Ramlan Surbakti mengartikan bahwa Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan, melalui pesan ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang ideal dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti pemerintah, sekolah, dan partai politik (Ramlan, 2010).

Pendidikan politik adalah keilmuan yang diperoleh melalui pemberi atau memperoleh dalam organisasi dan lembaga sebagai ranah terjadinya ataupun kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur politik, sebagaimana penelitian ini yang mengandung terjadinya pendidikan politik dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat terhadap penerima yaitu masyarakat sebagai anggota maupun warga (Wihardi et al., 2011).

Kartono dikutip oleh Hermawan bahwa pendidikan politik bertujuan membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga, masyarakat, rakyat). Mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik. Berani bersikap tegas, memberikan kritik, serta membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak sesuai. Aktivitasnya diarah pada proses demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga Negara. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama (Hermawan, 2020).

Pendidikan politik merupakan sebuah unsur dan usaha yang dilakukan oleh salah satu yang mempunyai peran (kedudukan) terhadap sesama makhluk sosial, oleh karena itu pendidikan politik sangat identik dan erat hubungannya dengan proses sosialisasi politik, tindakan ini sama saja dengan melakukan sosialisasi dan tercipta sebuah komunikasi politik. Pendidikan politik tidak bersifat secara langsung dan terpusat yang sering dilakukan oleh sebuah kelompok ranah politik atau lembaga khusus yang memberikan pendidikan politik (Senjaya & Latief, 2019).

Pendidikan politik, juga bertujuan memperhatikan dan mengupayakan yang terbagi. Peranan insan dalam setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri atau aktualisasi diri dari dimensi sosial). Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya agar orang bisa aktif dalam proses politik demi membangun diri dan

masyarakat sekitar, bangsa dan Negara. Pendidikan politik dapat diberikan dari berbagai jalur. Dan dalam melakukan untuk pemberian pendidikan politik terhadap masyarakat, perlu diketahui bahwa tidak hanya dibatasi oleh lembaga-lembaga, sekolah, dan partai politik saja (Kartini, 2012).

Pendidikan politik memiliki tujuan yang dapat mempengaruhi untuk membentuk masyarakat atau warga negara terhadap sifat demokrasi yang baik, tidak hanya itu dengan adanya pendidikan politik masyarakat dapat lebih mengedapankan kesadaran politik untuk dapat menyeimbangkan pola pikir dan mengoptimalkan partisipasi terhadap pengaruh berjalannya proses politik. Aspek yang paling penting adalah proses pemilihan kepala daerah sebagai sehingga penerapan pendidikan politik sangat optimal.

Salah satu wujud demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan penguatan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah (Gaffar, 2012). Pilkada langsung sejatinya merupakan jalan demokrasi dan amanat konstitusi Indonesia yang harus terselenggara secara demokratis. Pilkada yang demokratis dapat menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur demokrasi modern di Indonesia apabila hasilnya menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat serta diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat (Budiardjo., 2008).

Pilkada langsung merupakan terobosan politik yang signifikan dan berimplikasi cukup luas terhadap daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Karena itu, pilkada langsung merupakan proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Pada dasarnya, pilkada langsung merupakan daulat rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik (Hanafi, 2014).

Masa pemberlakuan UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004, proses awal pemilihan kepala daerah sama, yaitu dipilih secara langsung oleh DPRD, tanpa memerlukan pengesahan lebih dulu dari pemerintah pusat. Kewenangan DPRD dalam pemilihan kepala daerah demikian besar, namun setelah keluarnya perpu mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, maka kedua Undang-undang ini terjadi perbedaan dalam mekanisme pemilihan dan pelaksana pemilihan. Dalam UU No. 22/1999, pelaksana pemilihan berada di lembaga DPRD, tetapi dalam UU No. 32/2004 pelaksana dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (Gadjong, 2007).

Pemilihan Kepala Daerah mempunyai arti penting bagi masyarakat, yang bersifat demokrasi untuk memilih figur kepala daerah sebagai pimpinan atau penguasa di kabupaten/Kota. Berkaitan dengan penelitian ini yang terletak pada ruanglingkup Demokrasi kecil yaitu pilkada, sebuah konteks menggambarkan figur organisasi masyarakat bagaimana melakukan pergerakan kepada pengikutnya atau kelompok yang berada didalamnya terhadap gejolak pesta demokrasi baik menghadapi dan efek di dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.

Partisipasi Politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahun tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Ramlan, 2010).

Partisipasi Politik itu, sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung dan tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya (Budiardjo., 2008).

B. METODE KAJIAN

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Karena dengan fenomena-fenomena yang telah ada bahwa untuk memperoleh gambaran Peran pendidikan politik yang di jalankan secara tidak langsung dengan melihat dan mengkaji kepada suatu objek yang alamiah secara sosial, tindakan Peran organiasai masyarakat sangat berkaitan dengan tindakan sosial kepada masyarakat melalui berbagai cara yang di lakukan agar membentuk partisipasi poitik masyarakat.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian

penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2015).

C. HASIL KAJIAN

1. Gambaran umum Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu Organisasi Masyarakat Islam terbesar di Indonesia, lahir pada 18 November tahun 1912 dengan pendirinya Muhammad Darwis atau di kenal Kh. Ahmad Dahlan. Indonesia yang di kuasai oleh penjajahan Belanda, menyebabkan keterbatasan akan ilmu pengetahuan Agama Islam membuat masyarakat banyak mengarah kepada amalan mistik dalam beragama Islam, melihat keadaan tersebut Muhammad Darwis mengajak untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu karakter Muhammadiyah adalah sebagai gerakan dakwah "*AmarMa'ruf Nahi Munkar*" dan menegakkan serta menjunjung tinggi ajaran Islam agar dapat terwujud masyarakat Islam yang benar.

Perjuangan yang dilalui oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan untuk merebut kekuasaan menciptakan kemerdekaan bagi rakyat, Muhammadiyah juga ikut berperan dalam kemerdekaan tersebut bahkan jika melihat kebelakang dalam sejarah peran tersebut berada di posisi vital. Tetap digaris bawahi bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik melainkan organisasi nonpolitik. Sebagai organisasi nonpolitik, Muhammadiyah memiliki peran politik bisa disebut tidak secara langsung dan terbuka, tetapi terkadang dengan keadaan situasional dilakukannya peran secara langsung dan terbuka. hal inilah yang membuat masyarakat salah beranggapan mengartikan sebagai organisasi politik.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang secara istilah, warga negara mempunyai hak setara dalam mengambil keputusan untuk menentukan keadaan selanjutnya. Oleh sebab itu pemimpin yang terpilih menjadi penguasa, tidak terlepas atas partisipasi politik masyarakat dalam sebuah pesta demokrasi berupa pemilihan langsung oleh rakyat.

Muhammadiyah di Sumatera Utara berdiri dari perantau-perantau Minangkabau, Jawa dan Mandailing. Bertemulah St. Juin, Mas Pono Dari Yogyakarta, Sutan Marajo, Kari Suib dari Tapanuli merekapun sepakat untuk mendirikan Muhammadiyah. Pada tanggal 1 juli 1928 dibentuklah Muhammadiyah secara resmi dengan ketua pertama kepada Hr Muhammad Said dan Mas Pono sebagai sekretaris. frekuensi gerakan dakwah Muhammadiyah semakin ditingkatkan dengan mendatangkan

penceramah-penceramah yang terfokus pada masalah usholli, meluruskan arah kiblat, shalat pakai dasi, kenduri kematian, ziarah kubur Shalat Hari Raya di lapangan terbuka dan sholat lain 11 rakaat pada bulan suci Ramadhan. Gerakan Muhammadiyah ini meluas sampai kekota pesisir lainnya, mulai muncul gerombolan kecil Muhammadiyah (sekarang pimpinan Ranting Muhammadiyah).

Muhammadiyah dalam perspektif ideologi merupakan gerakan islam berideologi kemajuan dengan misi dakwah dan tajdid sebagai identitas gerakannya. Idiom “kemajuan”, “maju”, “memajukan”, dan “berkemajuan” telah melekat dalam pergerakan muhammadiyah sejak awal berdiri hingga dalam perjalanan berikutnya (Nashir, 2019). Dalam Statuten tahun 1912, tercantum kata “memajukan” dalam frasa tujuan muhammadiyah, yaitu “*Memajoekan hal igama kepada anggauta-anggautanja*”. Kiai Dahlan, seringkali mengungkapkan pentingnya berkemajuan. Ideologi muhammadiyah merupakan rumusan tentatif yang bisa berubah, yang digali dari sumber nilai islam, keyakinan, tradisi, dan pemikiran kontemporer serta pemikiran para elit persyarikatan. Adapun fungsi Ideologi muhammadiyah yang terdapat pada anggaran dasar, dan pedoman hidup Muhammadiyah yaitu :

1. Sebagai alat untuk melihat persoalan atau kondisi kehidupan yang dihadapi masyarakat dan yang ingin diubah oleh muhammadiyah
2. Merasionalkan pandangan, ide, gagasan, dan program gerakan
3. Sebagai alat untuk memperhankan diri dan melawan serangan lawan
4. Justifikasi filosofi bagi tujuan gerakan (Jainuri, 2020).

Muhammadiyah mempunyai Ideologi yang berkemajuan, pergerakan yang menuju dan melakukan perubahan dengan menyesuaikan dalam keadaan zaman. Islam memiliki nilai kemajuan untuk mewujudkan umat manusia yang cerah, oleh karena itu julukan lain dari Organisasi masyarakat ini adalah Sang Pencerah. Ideologi ini dapat dikatakan sebagai Modernisme Islam, yaitu mencoba belajar dari kemajuan atau modern tanpa meninggalkan inti ajaran islam itu sendiri.

2. Peran Muhammadiyah dalam memberikan pendidikan politik Pada Pilkada 2020

Peran Muhammadiyah dalam memberikan pendidikan politik Pada Pilkada 2020 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara. Menuju Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan Latar belakang Agama tidak dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah tidak mengenal politik. Sebagai Organisasi Masyarakat Islam, Muhammadiyah memberikan

Muhammadiyah Dan Pendidikan Politik

Volume 7 | Nomor 2 | 158 – 174 | Desember 2022

Peran terhadap warganya dengan melaksanakan Pendidikan Politik dalam bentuk pengajian. Dalam kesempatan ini Penulis Mewawancarai Bapak Aripay Tambunan Majelis Dikdasmen Wilayah Muhammadiyah dan Selaku Calon Wakil nomor urut 3 sebagai pemateri dalam pengajian Ranting Barat Kecamatan Kualuh Hulu Kelurahan Aek Kanopan.

Pengajian yang dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Barat di Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu pada tanggal 14 Oktober tahun 2020 yang mengundang Bapak Aripay Tambunan sebagai kader muhammadiyah dan calon wakil nomor urut 3 pada Pemilihan Kepala Daerah Labuhan Batu Utara, dengan membawa materi Pendidikan Politik yang menggambarkan konsep Demokrasi.

Kehadiran calon wakil nomor urut 3 pada Pemilihan Kepala Daerah Labuhan Batu Utara, adalah sebuah Inisiatif dari pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Barat untuk mendatangkan sebagai pemateri pada pengajian bertujuan memberikan kesempatan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana sosok dan karakteristik kader sebagai calon pada Pemilihan Kepala Daerah. Dan untuk menghindarkan konsekuensi pandangan yang salah dari masyarakat, maka dari itu Pimpinan Ranting Barat mendatangkan kedua calon sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah.

Pimpinan Ranting Barat mengundang Kader Muhammadiyah sebagai calon wakil pada Pemilihan Kepala Daerah untuk bertujuan memberikan Materi Pendidikan Politik sebagai edukasi politik kepada masyarakat, namun tidak bersifat untuk mengarahkan pada satu tujuan. Kajian penelitian yang mengarah kepada Organisasi Masyarakat tentu banyak melakukan peran sosial baik itu sebagai pengurus dan anggotanya. Pandangan salah satu warga terhadap peran Pengurus Pimpinan Ranting yang telah mereka laksanakan, bahwasanya sikap tersebut bertujuan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat dan memperlihatkan sosok kader lebih mengenal dan tidak terjebak dalam Politik Praktis.

Pengajian yang dilakukan tersebut dihadiri oleh jam'ah Pria dan Wanita. Organisasi Masyarakat Muhammadiyah di Kabupaten Labuhan Batu Utara melakukan Peran Pendidikan Politik terhadap warganya menjelang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dengan mendatangkan kader yang mencalon dalam bentuk perkumpulan pengajian di Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat. Kader merupakan sosok yang akan memegang peran yang penting dan tidak terlepas dari binaan Organisasi, oleh sebab itu tindakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan di kalangan Internal karena dapat di

katakan bahwa Muhammadiyah Ranting Barat melakukan peran tersebut tentunya mempunyai alasan dan tujuan tersendiri.

Organisasi Masyarakat Islam di Kabupaten Labuhan Batu Utara terkhusus di Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu. Terbukti bahwa Muhammadiyah memiliki dua Kader sebagai calon dan wakil calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Utara tahun 2020. Tentunya kehadiran kedua kader tersebut melahirkan peran dan upaya bagaimana sikap yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Seperti yang telah dilakukan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Barat dengan mengundang kader sebagai wakil calon pada Pemilihan Kepala Daerah untuk pemateri pada pengajian di Masjid Ranting Barat.

Bapak Aripay Tambunan adalah salah satu Kader Muhammadiyah yang berada dalam kepengurusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai Ketua Majelis Dikdasmen periode 2010-2020 sesuai dengan peraturan yang ada bahwasanya Pimpinan Pusat menyatakan dalam melaksanakan pengajian penceramah diwajibkan dari warga persyarikatan Muhammadiyah. Oleh karena itu tidak ada salahnya dengan mengundang Bapak Aripay Tambunan sebagai pemateri yang membawa Judul “*Peran Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*” dengan konsep yang diberikan lebih kepada seperti pembelajaran terhadap masyarakat berupa edukasi yang menggambarkan karakteristik sistem Demokrasi.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah mengambil sikap dengan melakukan rekomendasi tujuan tersebut tidak lain adalah untuk memberikan dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap pasangan calon nomor urut empat. Permasalahan timbul dikarenakan adanya sebuah gesekan yang timbul dikalangan Internal, Pimpinan Daerah Muhammadiyah mengambil sikap dengan melakukan rekomendasi tujuan tersebut tidak lain adalah untuk memberikan dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap pasangan calon nomor urut empat.

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat mereka mengambil sikap dengan melakukan peran tersebut. Lantas mengapa hal tersebut menjadi sebuah permasalahan dan dapat menimbulkan gesekan, tentunya kita dapat mengetahui tindakan tersebut adalah keputusan dalam sebuah Organisasi dan Partai Amanat Nasional bukanlah partai Muhammadiyah, namun yang selalu mendominasi adalah warga Muhammadiyah.

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat terlebih dahulu mendatangkan Bapak Ali Tambunan kader Muhammadiyah sebagai calon Bupati nomor

Muhammadiyah Dan Pendidikan Politik

Volume 7 | Nomor 2 | 158 – 174 | Desember 2022

urut 2 pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dalam pengajian tersebut di lengkapi dengan materi kepemimpinan berselang dua minggu kemudian Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat mendatangkan Bapa Aripay Tambunan yang membawa materi Pendidikan Politik. Kedatangan kedua kader ini adalah bentuk dari peran yang dilaksanakan Pimpinan Ranting Muhammadiyah, dengan memberikan edukasi dengan konteks dalam bentuk pengajian, tujuannya adalah untuk menyeimbangkan dan menghindarkan dari kesimpulan yang berbentuk dukungan sepihak terhadap salah satu Kader saja.

Keberadaan jam'ah dan simpatisan yang hadir dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut merupakan jalur bagi peneliti untuk mendapatkan gambaran dengan ruang lingkup terhadap keadaan dalam pengajian yang dibentuk oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat. Pelaksanaan Pendidikan Politik merupakan suatu tindakan yang dapat menghasilkan jawaban, seperti bentuk edukasi terhadap pemberi dan penerima yang mengarahkan masyarakat terhadap demokrasi yang lebih baik dan meningkatkan pengetahuan terhadap keadaan suasana politik.

Muhammadiyah tidak berpolitik namun pengajian pada tanggal 14 Oktober tersebut itu sudah menjadi alasan dan tujuan tersendiri oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Barat, dan perlu diketahui pengajian rutin yang dilakukan sangat bermanfaat bagi warga ataupun Masyarakat umum di Ranting Barat, bahkan mereka selalu mendukung, serta bersimpati pada Muhammadiyah Ranting Barat. Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah tidak dapat dikatakan sebagai basis yang netral dan mereka memiliki sifat untuk mengupayakan hal tersebut.

Aspek pendidikan politik, perlu adanya tingkat perolehan suara yang dapat menggambarkan dampak dari pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat dengan mendatangkan wakil calon nomor urut 3 pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Seperti yang terlihat pada table dibawah ini, adalah hasil perolehan suara pada Pilkada tahun 2020 Kabupaten Labuhan Batu Utara di wilayah Kelurahan Aek Kanopan Barat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Rincian Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Kualuh
Hulu Kelurahan Aek Kanopan Barat

NO Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Rincian		
		TPS 13	TPS 14	TOTAL
1	Darno, dan Haris Muda Siregar	54	34	88
2	Dra. H Ali Tambunan, dan Raja Panusunan Rambe, SE	22	19	41
3	H. Ahmad Rizal Munthe, SH, dan H. Aripay Tambunan, MM DRS	35	24	59
4	Hendri Yanto, SE, dan H. Samsul Tanjung, ST, MH	50	51	101
5	Drs Dwi Prantara, dan Drs Edi Sampurna Rambey, M.Si	54	35	89
	Jumlah Suara Sah	215	163	378
	Jumlah Suara Tidak Sah	3	3	6

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dikatakan bahwa perolehan suara Pada TPS 13 dan 14, dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 4 yaitu pasangan calon Hendri Yanto dan Samsul Tanjung, diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu Darno dan Haris Muda, pasangan calon Independent nomor urut 5 yaitu Dwi Prantara dan Edi Sampurna Rambey, Pasangan calon nomor Urut 3 Ahmad Rizal Munthe dan Aripay Tambunan serta Pasangan calon nomor urut 2 Ali Tambunan dan Raja Panusunan Rambey. diketahui bahwa kedua TPS tersebut adalah wilayah yang dipenuhi sebagian besar Masyarakat yang tergolong berstatus warga Muhammadiyah disebut sebagai Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat, kemudian tempat pelaksanaan pengajian yang mengundang pemateri sebagai calon wakil Bupati pada Pilkada 2020 yang membawa materi Pendidikan Politik. Pada nomor urut 2, yaitu calon Bupati Ali Tambunan dan nomor urut 3 calon wakil Bupati Aripay Tambunan mereka adalah kedua kader Muhammadiyah yang mencalonkan diri pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Namun perolehan suara yang mereka dapatkan dapat dikatakan terendah dari ketiga pasangan calon yang berbeda, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek suatu permasalahan partisipasi terhadap sesama warga persyarikatan.

Pendidikan politik bertujuan, agar orang bisa aktif dalam proses politik demi membangun diri dan masyarakat sekitar, bangsa dan Negara. Keberhasilan pendidikan

politik dapat terlihat dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap proses politik, Keberadaan Pilkada dapat menggambarkan bentuk tersebut. Namun Pendidikan Politik tidak dapat dijadikan sebagai jalan untuk membentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Oleh sebab itu dengan pendidikan politik yang dilaksanakan bukanlah suatu tindakan yang merupakan strategi oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat terhadap warga untuk meningkatkan dukungan, tetapi terlihat jelas bahwa mereka dengan melaksanakan pendidikan politik tersebut hanya untuk memberikan edukasi politik dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung. Bahkan suara terbanyak dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 4.

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat mengundang kedua kader yang mencalon pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Utara salah satunya membawa materi pendidikan politik untuk memberi ruang kepada kader tersebut, diawali dengan keputusan yang diambil Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk melakukan rekomendasi terhadap calon nomor urut 4, yang ditakutkan akan merusak dukungan dalam Muhammadiyah yang membuat pecah dan timbulnya gesekan dikalangan internal terutama pengurus. Peran juga dilaksanakan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Labuhan Batu Utara dengan mengadakan pekumpulan gabungan berbagai ortom dengan tema Peran generasi muda menjaga keutuhan demokrasi menuju Pemilihan Kepala Daerah berkemajuan.

Aisyiyah merupakan salah satu Ortom sayap kanan Muhammadiyah yang diisi oleh kaum Perempuan seperti yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap Ibu Herlin selaku Ketua dari Pimpinan Daerah Aisyiyah sebagai narasumber yang menjelaskan bahwa dalam perkumpulan Aisyiyah dapat dikatakan tidak melakukan peran secara langsung terhadap menjelang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di karenakan kurangnya pemahaman terhadap politik oleh karena itu dalam berpartisipasi Aisyiyah di Labuhan Batu Utara sangat kurang terhadap politik, dan seharusnya sangat penting untuk dapat melakukan pendidikan politik untuk menyambut Pemilihan Kepala Daerah.

D. PEMBAHASAN

1. Dinamika Muhammadiyah Dalam Melakukan Peran Pendidikan Politik Pada Pilkada 2020

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi masyarakat bagi umat beragama Islam yang ada di Indonesia yang bersifat non politik. Hambatan adalah salah satu yang

dapat disebut sebagai halangan atau penghalang, rintangan dan suatu keadaan yang tidak dikehendaki. Dalam pelaksanaan peran tentunya terdapat sebuah penghalang dan rintangan yang dapat disebut sebagai hambatan. Muhammadiyah mempunyai kekuatan besar untuk melakukan peran mereka sebagai organisasi non politik, akan tetapi Muhammadiyah juga memiliki hambatan dalam melaksanakan peran mereka terhadap warganya terhadap proses politik menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Labuhan Batu Utara.

Ada dua hambatan yang utama adalah menjelang Pemilihan Kepala Daerah dengan pengajian yang dilaksanakan membawa politik diperkirakan oleh masyarakat yaitu berupa tindakan untuk mendukung. Hambatan berikutnya kurang didukung oleh beberapa pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah, yang menyebabkan kurangnya koordinasi sehingga membuat kehadiran jam'ah tidak banyak.

Hambatan terlihat terhadap kehadiran jam'ah yangterlampau sedikit dikarenakan terdapat daya tarik yang kurang karenainformasi yang disebarakan hanya berbentuk Flyer melalui online oleh karena itu banyak yang kurang mengetahui bahwasanya pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat mendatangkan kader. dengan keberadaan Pandemi yang merubah kebiasaan dengan mengondisikan terhadap keadaan yang tidak memungkinkan untuk berada diluar terlalu lama.

Pimpinan Ranting Barat mengalami hambatan dengan perencanaan awal untuk melakukan pengajian secara daring, namun dikarenakan keterbatasan waktu jam'ah serta kemampuan kaum orang tua yang sudah lanjut usia dalam menggunakan metode online. Dan hambatan terdapat pada jam'ah pemuda yang terkadang bersifat Apatis terhadap pengajian rutin tersebut. Dengan keadaan pandemi yang sebagai hambatan utama. Dan dampak dari keputusan yang telah dibuat oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan mengeluarkan rekomendasi untuk mendapatkan sampan Partai Amanat Nasional kepada pasangan calon nomor 4, justru tindakan tersebut tidak melahirkan intruksi dari Pimpinan Daerah kepada pengurus cabang dan ranting, keputusan yang telah dilakukan dapat menimbulkan sifat kekecewaan bagi kalangan Muhammadiyah.

Hambatan terlihat terhadap kehadiran jam'ah yangterlampau sedikit dikarenakan terdapat daya tarik yang kurang karenainformasi yang disebarakan hanya berbentuk Flyer melalui online oleh karena itu banyak yang kurang mengetahui bahwasanya pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat mendatangkan kader. dengan keberadaan Pandemi yang merubah kebiasaan dengan mengondisikan terhadap keadaan yang tidak memungkinkan untuk berada diluar terlalu lama.

Keadaan pandemi yang terjadi menjadi halangan yang sangat besar bagi kepengurusan pemuda daerah untuk menjalankan program peran mereka terhadap Pemilihan Kepala Daerah, bahkan untuk pelantikan secara seremonial tidak dapat dilakukan. Kemudian dari kalangan Pemuda Daerah masih kekurangan sosok yang mampu untuk memberikan gagasan dalam melahirkan program yang dapat di terima kepada Pimpinan Daerah dan bermanfaat bagi warga Muhammadiyah Labuhan Batu Utara.

Beberapa gagasan yang menghasilkan hambatan dapat menggambarkan keterhubungan antara beberapa kepengurusan Muhammadiyah di Labuhan Batu Utara Kecamatan Kuluh Hulu, untuk melakukan dan melaksanakan peran terhadap Pemilihan Kepala Daerah 2020 adalah situasi pandemi yang mengakibatkan dan mengharuskan masyarakat untuk memberi batasan terhadap kegiatan mereka di luar rumah.

Adapun hambatan muhammadiyah dalam melakukan perannya pada pilkada 2020 di kecamatan kualuh hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara provinsi Sumatera Utara. Hambatan berupa hal yang dapat menghalangi terhadap Individu ataupun kelompok dalam sebuah ikatan Organisasi ketika dalam menjalankan aktivitas dan Peran mereka. Oleh sebab itu dengan peran pendidikan politik yang dilaksanakan tentunya melahirkan beberapa hambatan, yaitu sebagai berikut.

Pertama, Pengajian adalah salah satu kegiatan yang dapat disebut dakwah, menanamkan nilai-nilai agama ataupun norma-norma terhadap masyarakat sebagai jam'ah yang hadir di mesjid. Namun dengan peran yang dilaksanakan melalui pengajian tersebut terdapat hambatan yaitu dalam menerima informasi kepada masyarakat dikarenakan pengajian tersebut hanya diinformasikan dengan bentuk flyer secara online banyak yang tidak mengetahui mengakibatkan kedatangan jam'ah terlampau sedikit.

Kedua, Hambatan lahir terhadap kegiatan yang telah dilalui. Oleh karena itu keberadaan kaum muda adalah hal yang dapat menjadi sorotan bagi kaum tua dikarenakan dengan keberadaan mereka yang sangat aktif membuat varian baru dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ataupun programkan adanya hal-hal yang baru muncul bahkan dapat dikatakan tindakan yang praktis. Namun yang terjadi pada jam'ah kaum muda pada pengajian tersebut terlampau sedikit dengan sifat terkadang apatis terhadap pengajian yang dilaksanakan, tidak terlalu memperdulikan.

Ketiga, Hambatan yang dilalui oleh Pimpinan Daerah dalam melakukan peran mereka terhadap Pemilihan Kepala Daerah adalah dengan keberadaan warga Muhammadiyah yang sering terjadi yaitu tidak selalu untuk mengikuti pengajian Rutin

apabila dilaksanakan, dikarenakan adanya kesbukan yang lain dan tentunya hal tersebut adalah tindakan yang seharusnya tidak dibatasi oleh pengurus untuk mengharuskan dalam mengikuti pengajian.

Hambatan lahir yang dialami dari Pimpinan Pemuda Daerah Muhammadiyah mereka adalah salah satunya dengan keadaan pandemi saat ini yang menghambat untuk menjalankan program menyambut Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Serta kekurangan wajah Intelektual sebagai penggerak yang memberikan dampak sebagai penghambat bagi Pemuda Daerah Muhammadiyah untuk melakukan peran yang bermutu dan bermanfaat menjelang Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Utara bahkan perkumpulan-perkumpulan yang mereka lakukan dianggap sebagai ajang yang biasa saja. Tidak hanya itu diikuti dengan keberadaan pandemik kegiatan-kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan seperti Pelantikan secara seremonial tidak dapat di laksanakan.

E. SIMPULAN

Peran yang dilaksanakan lahir bukan karena adanya paksaan atau ancaman. Keputusan Inisiatif yang dibuat oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat kepada kedua kader yang mencalon pada Pemilihan Kepala Daerah, dengan mengundang kedua kader tersebut untuk menjadi pemateri pada pengajian dimasjid Ranting, dengan jadwal yang berbeda agar memberi mereka ruang terhadap warga Muhammadiyah. Peran tersebut dilaksanakan diakibatkan dampak dari keputusan yang mengambil sikap melakukan rekomendasi untuk memberikan dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap pasangan calon nomor urut empat. Keputusan yang diambil oleh Pimpinan Daerah keberadaan tersebut ditakutkan akan merusak dukungan dalam Muhammadiyah. Meskipun Pimpinan Ranting tidak bersifat mengarahkan mengarahkan kemana-mana, hanya memberi Inisiatif. Peran juga dilaksanakan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Labuhan Batu Utara dalam menuju Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yaitu dengan mengadakan Tabligh Akbar yang bertema berupa gabungan diantara beberapa ortom yang berhadir dimulai dari Pimpinan Daerah hingga ketinggian Ranting.

Hambatan Muhammadiyah dalam melakukan peran pendidikan politik adalah, Penyebaran Informasi pengajian dengan mendatangkan kader dibuat dengan Flyer secara

Muhammadiyah Dan Pendidikan Politik

Volume 7 | Nomor 2 | 158 – 174 | Desember 2022

online mengakibatkan kehadiran jam'ah terlampaui sedikit dikarenakan dampak dari keadaan pandemi membuat antar sesama masyarakat mengubah kebiasaan mereka untuk tidak selalu berkomunikasi dan bercengkrama satu sama lain, kebiasaan komunikasi tersebut mempermudah untuk menyampaikan informasi. Hambatan berikutnya jam'ah kaum muda pada pengajian tersebut terlampaui sedikit dengan sifat yang terkadang apatis terhadap pengajian yang dilaksanakan, tidak terlalu memperdulikan. Kemudian hambatan lahir melalui dampak keputusan yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah menyebabkan kurangnya koordinasi antara pengurus daerah dan ranting menyebabkan kedatangan Jam'ah terlampaui sedikit hanya dipenuhi beberapa warga Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aek Kanopan Barat

Daftar Pustaka

- Budiardjo., M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT: Gramedia Pusataka Utama.
- Gadjong, A. A. (2007). *Pemerintahan Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Gaffar, J. M. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press.
- Hanafi, R. I. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik* No. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 1–12. <https://doi.org/2502-7476>
- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia. *Pendidikan Politik Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 16–25. <https://doi.org/2087-8718>
- Jainuri, A. (2020). *Manusia Merusak Alam* (p. 15). Suara Muhammadiyah.
- Kartini, K. (2012). *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Mandar Maju.
- Nashir, H. (2019). *Amar Makruf Nahi Munkar Muhammadiyah* (p. 14). Suara Muhammadiyah.
- Ramlan, S. (2010). *Memahami Ilmu Politik* (Revisi). Grasindo.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada.
- Senjaya, B., & Latief, S. (2019). *Memahami Politik*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarbaini, P. (2010). *Politik Pencitraan*. Gaung Persada Press.
- Wihardi, D., Rusdiyanta, & Syahrial, S. (2011). *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Ghalia.